

**Analisis Peran Pemerintah dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas**

**<sup>1</sup>Muhammad Fawwaz Zufar Mokke, Made Suwandi**

<sup>1</sup>Universitas Indonesia, Indonesia; fawwazmokke@gmail.com

*Received: March 19, 2023; In Revised: April 28, 2023; Accepted: May 23, 2023*

**Abstract**

Population growth that is not accompanied by support for human resource development can lead to problems such as managing economic and social dynamics in sectors that require development and training to fulfill the role of government. The purpose of this research is to analyze a deep understanding of the role of government in overcoming socio-economic conflicts through economic communities and which factors influence the process of economic empowerment. This study uses a descriptive analytical method with a qualitative approach. Research results show that economic-based community empowerment programs effectively promote sustainability and improve human well-being. The effectiveness of the program is influenced by active community participation, government involvement, development of knowledge and capacity, and use of local resources. Therefore, community-based economic empowerment programs should be designed with these factors in mind to provide optimal benefits to the community.

**Keyword:** Government role, Community-based Economy, Community Empowerment

**Pendahuluan**

Konflik sosial dan ekonomi komunal tercatat selama periode lima tahun (1998-2003) dengan sedikitnya 21.495 kematian (Barron et al., 2014) dan enam provinsi yang tergolong konflik besar berdasarkan insiden konflik yang ada yaitu Aceh, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat (Gambar 1). Data tersebut didukung oleh klaim Muliono (2020) bahwa krisis berdampak pada konflik kekerasan dari segi ekonomi, yang tercermin dari tingkat kemiskinan dan sulitnya masyarakat memperoleh sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sisi sosial, konflik kekerasan seringkali didasarkan pada identitas, moralitas, dan agama. Ketiganya harus dilihat sebagai satu kesatuan yang saling terkait.



Gambar 1. Total Insiden Sepanjang Tahun 2012 Berdasarkan 16 Provinsi

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas merupakan elemen kunci dari pemberdayaan masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan karena jika masyarakat memiliki izin tetapi kekurangan atau kekurangan kemampuan untuk menjalankan kekuasaan tersebut maka hasilnya akan sama dan tidak maksimal (Darmansyah et al., 2014). Penduduk Indonesia diproyeksikan tumbuh dari sekitar 249 juta pada tahun 2013 menjadi sekitar 295 juta pada tahun 2023, menurut Proyeksi Penduduk Indonesia 2018 2010-2035 yang diterbitkan oleh BPS. Pertambahan penduduk tanpa didukung peningkatan sumber daya manusia dapat menimbulkan persoalan kemiskinan dan pengangguran, terutama dalam mengelola dinamika ekonomi dan sosial di daerah-daerah yang membutuhkan pembangunan dan pelatihan. Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahannya, negara harus mampu menerapkan metode pembangunan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional bahkan daerah untuk menciptakan kesejahteraan (Jusnaeni, 2017).

Salah satu cara untuk meningkatkan dampak ekonomi masyarakat adalah melalui pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat. Metode ini memfokuskan pada pembangunan ekonomi dengan mengoptimalkan sumber daya local yang dikelola bersama berdasarkan kekuatan anggota masyarakat berdasarkan asas timbal balik dan kekeluargaan. Menurut Ramadhan & Dwi (2017), inti dari sistem ekonomi kerakyatan adalah ekonomi harus ditopang dari bawah, dimana masyarakat peserta sendiri memiliki peluang aktif untuk swasembada. Berkembang (*self-reinforcing*), berasal dari masyarakat dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau dikelola oleh masyarakat itu sendiri untuk mencapai nilai tambah ekonomi dan sosial. Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengembangkan potensi masyarakat. Sehingga masyarakat dilatih untuk mandiri secara finansial sesuai dengan kemampuannya tanpa campur tangan pihak luar. Model ekonomi ini harus diterapkan di masyarakat Indonesia untuk mengembangkan potensinya. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis pemahaman yang mendalam tentang peran pemerintah dalam mengatasi konflik sosial ekonomi melalui metode ekonomi kerakyatan dan faktor-faktor yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi tersebut.

### Metode

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk lebih memahami peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik sosial ekonomi melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode kualitatif antara lain observasi dan analisis dokumen. Referensi yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah sumber-sumber yang terkait dengan konflik sosial-ekonomi dan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas di Indonesia. Sumber-sumber ini meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan sumber-sumber online. Selain menggunakan referensi-referensi tersebut, penulis lebih menitik beratkan analisis terhadap temuan<sup>2</sup> yang dihasilkan dari studi kasus yang dilakukan oleh beberapa peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peran pemerintah dalam menangani konflik sosial-ekonomi di masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Dengan menggunakan metode kualitatif dan referensi yang relevan, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran pemerintah dalam menangani konflik sosial-ekonomi di masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

### Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas

Tujuan Program Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masyarakat adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan peluang yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pernyataan ini selaras dengan Andriani et al. (2020), masyarakat didorong untuk mandiri secara finansial, menggunakan potensinya tanpa campur tangan pihak luar. Oleh karena itu, model pembangunan ekonomi seperti itu perlu diterapkan pada masyarakat Indonesia, sehingga mereka dapat mewujudkan potensinya.

Terdapat beberapa penelitian yang merujuk pada program pemberdayaan ini, hasilnya menunjukkan bahwa peranan komunitas mampu menurunkan konflik sosial-ekonomi yang terjadi dimasyarakat. Berdasarkan penelitian Hilman dan Elok (2018), program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas di desa Janda Dadapan fokus pada pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan pembuatan olahan pangan, pembuatan lumbung dapur, dan pelatihan berkesenian kepada ibu-ibu janda di desa tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program ini efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan psikologis masyarakat. Peran pemerintah dalam program ini adalah sebagai promotor dan penggerak kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dewan bertanggung jawab untuk menyediakan keuangan dan sumber daya lainnya untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik.

Penelitian dari Andriani *et al.* (2020) menyebutkan bahwa pengembangan Pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat di Kota Madiun memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan masyarakat. Program ini membantu meningkatkan kemandirian finansial masyarakat dan membekali masyarakat miskin dengan keterampilan hidup untuk mandiri secara finansial. Kegiatan ini melibatkan beberapa fungsi pemerintahan. Dalam pengembangan usaha tahu, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat berperan sebagai promotor dan pemicu peluang ekonomi. Pemerintah memberikan dukungan finansial dan teknis seperti pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja, sementara LSM membantu pemasaran produk tahu di Madiun dan sekitarnya.

Dalam pengelolaan sampah, pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk mengatasi masalah limbah tahu yang berbau busuk di kawasan Taman. Pemerintah daerah dan non daerah membantu mengolah ampas tahu secara sosial agar tidak berbau, sedangkan masyarakat memanfaatkan ampas tahu tersebut untuk peternakan babi. Terakhir, dalam bidang pariwisata, pemerintah, perbankan, sekolah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat umum bersinergi untuk mengembangkan dan mempromosikan daya tarik wisata kota Madiun. Program tersebut mencakup berbagai kegiatan seperti pengembangan pengetahuan pariwisata, pengorganisasian sumber daya untuk program dan analisis risiko.

Berbeda halnya dengan penelitian Pratiyudha *et al.* (2020), konflik agraria yang bersifat laten di Desa Nglumut, Magelang, Jawa Tengah, memerlukan perhatian khusus dalam upaya penciptaan integrasi. Konflik tersebut timbul dari permasalahan tersembunyi antara petani salak dan penambang pasir yang hidup berdampingan, namun aktivitas penambangan pasir dianggap merusak lingkungan dan mengancam lahan pertanian milik petani salak. Untuk mengatasi konflik tersebut, Komunitas Srimpi Urip didirikan sebagai strategi rekonsiliasi melalui mediasi antar

kedua kelompok masyarakat yang berkonflik. Peran komunitas Srimpi Urip dalam mempromosikan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi di desa Nglumut, Indonesia. Komunitas ini memfasilitasi komunikasi dan kerja sama antara petani dan penambang pasir, sambil memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Keterlibatan komunitas dalam perencanaan dan implementasi inisiatif pelestarian lingkungan memastikan bahwa konteks dan kebutuhan lokal diperhatikan. Peran pemerintah dalam program ini adalah mendukung dan memfasilitasi upaya komunitas, seperti Srimpi Urip, dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Secara khusus, pemerintah memberikan pendanaan dan bantuan teknis untuk mendukung pengembangan mikroindustri dan inisiatif pemberdayaan ekonomi lainnya.

Hasil Kajian Ramadan C (2021) menunjukkan bahwa efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi Wanita Wanita Tani Mekar Sari Sejahtera di Lingkungan IX Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besari hanya memenuhi tiga ukuran efektivitas yaitu pemahaman program, penargetan ketepatan dan mencapai tujuan. Faktor pendukung keberhasilan program antara lain potensi pertanian yang melimpah, kesadaran dan kerjasama anggota, serta dukungan dari masyarakat sekitar. Namun, program tersebut terkendala karena tidak adanya payung hukum atau badan koperasi yang menyalurkan hasil program tersebut.

Efektivitas program pemberdayaan ekonomi juga dilakukan oleh Program Pelatihan/Pendampingan Pengelolaan BUMDes "Wage Bersinar" di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu contoh program pemberdayaan masyarakat yang aktif. Namun, sejak adanya pandemi Covid-19, program tersebut mengalami kendala karena kurangnya SDM dan biaya yang kurang memadai. Dalam konteks ini, perlu dilakukan evaluasi terhadap program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan sebelum pandemi Covid-19, serta memperhatikan kendala yang dihadapi selama pandemi Covid-19 untuk melakukan penyesuaian program. Diperlukan upaya untuk memperkuat SDM masyarakat dan meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya dan modal, sehingga mereka dapat melanjutkan program pemberdayaan masyarakat dengan lebih efektif. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk mencari sumber pendanaan dan memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan.

Ditinjau dari efektivitasnya, program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas telah terbukti efektif dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Program ini memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk mengambil peran aktif dalam proses pembangunan, meningkatkan keterampilan, dan mendapatkan sumber penghasilan yang lebih baik. Terdapat beberapa analisis terhadap faktor yang mempengaruhi efektivitas program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas antara lain:

1. Partisipasi aktif masyarakat: Program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Pratiyudha *et al.* (2020). Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
2. Keterlibatan pemerintah: Dukungan dan keterlibatan pemerintah sangat penting dalam memastikan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Pemerintah dapat memberikan sumber daya dan dukungan teknis, serta menciptakan kebijakan dan peraturan yang memfasilitasi pengembangan program ini (Sahyana 2017).

3. Pengembangan keterampilan dan kapasitas: Program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang efektif membantu masyarakat lokal dalam mengembangkan keterampilan dan kapasitas yang diperlukan untuk mengelola usaha dan sumber daya secara berkelanjutan.
4. Memanfaatkan sumber daya lokal: Program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang berhasil memanfaatkan sumber daya lokal, seperti sumber daya alam atau keahlian khusus yang dimiliki oleh masyarakat lokal, dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Menurut Duncan dalam Richard M. Steers dalam bukunya "Efektivitas Organisasi", terdapat tiga ukuran efektivitas untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi, yakni:

1. Pencapaian Tujuan: Proses keseluruhan yang terdiri dari beberapa faktor, antara lain; kurun waktu dan sasaran yang menjadi target konkret. Sehingga diperlukan tahapan-tahapan dalam mencapai tujuan tersebut agar semakin terjamin keberhasilannya.
2. Integrasi: perhitungan terhadap kemampuan suatu organisasi dalam melakukan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi antar organisasi lainnya. Integrasi berfokus pada proses sosialisasi dalam organisasi sehingga dianggap penting untuk menjaga keharmonisan dan kerjasama antar anggota organisasi.
3. Adaptasi: keahlian suatu kelompok untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pengukuran adaptasi dapat digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Menurut Martan dan Lubis Ramadan C (2021), dapat digunakan tiga pendekatan menurut kriteria pengukuran efisiensi, yaitu: a) Pendekatan sumber daya, yaitu mengukur efisiensi input. Pendekatan tersebut mengutamakan keberhasilan organisasi dalam memperoleh sumber daya baik fisik maupun non fisik yang memenuhi kebutuhan organisasi; b) Pendekatan Proses (*Process Approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program sesuai dengan semua fungsi proses internal atau organisasi; c) Pendekatan tujuan (*Goals Approach*), dimana fokusnya adalah pada output, keberhasilan organisasi dalam mencapai hasil yang direncanakan diukur.

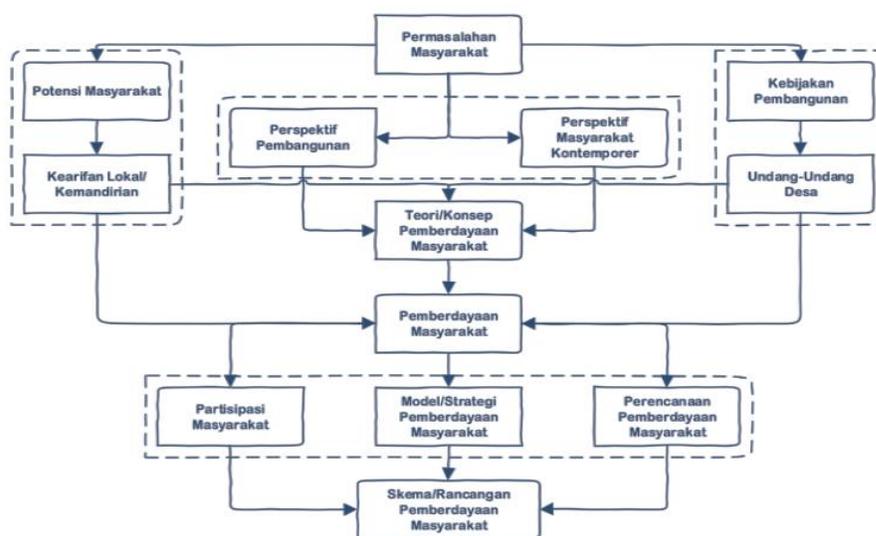
Dari segi implementasi, efektivitas program dapat berjalan dengan baik jika mencakup beberapa aspek (Totok Mardikanto & Poerwoko Soebianto 2007), keadaan sumber daya alam, keadaan sumber daya manusia, keadaan kelembagaan: pemberdayaan masyarakat juga harus membayar. memperhatikan kondisi kelembagaan bidang tertentu, seperti organisasi masyarakat, unit usaha dan instansi pemerintah, sarana dan prasarana, kebijakan pembangunan, potensi ekonomi dan keunggulan lokal dalam organisasi dan manajemen.

### **Peran Pemerintah dalam Mengembangkan Model Ekonomi Berbasis Komunitas**

Gambar 2 menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat dan daerah dalam memberdayakan masyarakat mengantarkan mereka pada kemandirian dan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak dapat diserahkan

sepenuhnya kepada tanggung jawab sendiri, tetapi pemerintah harus terlibat secara optimal dan mendalam agar pemberdayaan masyarakat dapat berfungsi secara optimal dan efektif. Upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya guna melalui pengembangan model ekonomi berbasis kerakyatan. Sebagai pemilik (regulator), forwarder (dinamis) dan fasilitator (Muusa, 2017).

Salah satu cara implementasi pemerintah adalah kerjasama para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program CSR (Darwis et al., 2019), hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah lebih mendukung pelaksanaan program CSR dengan memberikan regulasi dan kesempatan. Selain itu, pemerintah berkontribusi dalam sosialisasi program tanggung jawab sosial dan fasilitasi komunikasi antara perusahaan dan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat menunjukkan komitmennya terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kajian Sahyana (2017) juga menunjukkan partisipasi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa, diakui bahwa pemerintah desa Sukamulya menjalankan tugasnya dengan baik, dibuktikan dengan keikutsertaan desa dalam pemilihan desa mandiri tahun 2015. Hal ini terlihat dari berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan seperti aktivasi kelembagaan unit pengelola keuangan (UPH), peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi produktif. Selain itu, pemerintah desa juga berperan sebagai pembangun kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, kesehatan, keagamaan, pendidikan, keamanan dan kepemudaan. Dengan program-program tersebut, Pemerintah Desa Sukamulya berhasil memberdayakan masyarakat dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat desa.



Gambar 2. Skema Alur Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat

### Tantangan dalam Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas

Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas:

- a. Keterbatasan dana dan sumber daya: Implementasi program memerlukan sumber daya dan dana yang cukup besar, sehingga keterbatasan sumber daya dan dana dapat menjadi kendala dalam pelaksanaannya (Mardikanto, T., & Setiawan, A. 2020; Kusumawardhani, A. 2018).
- b. Kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat: Partisipasi dan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dapat menghambat keberhasilan program (Amin, M. 2018; Ari, D. P., & Suryana, Y. 2019).
- c. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang program: Masyarakat mungkin tidak memahami tujuan dan manfaat dari program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, sehingga kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang program dapat menghambat keberhasilan program Sari, D. P., & Suryana, Y. 2019; Mardikanto, T., & Setiawan, A. 2020).
- d. Tantangan sosial dan budaya: Sosial dan budaya masyarakat dapat menjadi kendala dalam implementasi program. Perbedaan budaya dan nilai-nilai sosial dapat mempengaruhi partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam program (Fauzi, A. 2017; Kusumawardhani, A. 2018).
- e. Tantangan teknologi dan infrastruktur: Kurangnya akses dan fasilitas teknologi dan infrastruktur dapat mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Infrastruktur yang minim atau tidak memadai dapat menghambat produksi dan distribusi produk serta akses ke pasar (Kusumawardhani, A. 2018; Mardikanto, T., & Setiawan, A. 2020).
- f. Tantangan kebijakan dan regulasi: Kebijakan dan regulasi yang tidak mendukung atau bahkan menghambat pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dapat menjadi kendala (Badan Pusat Statistik 2018).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik sosial ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mengatasi konflik sosial ekonomi yang terjadi dalam studi kasus ini, program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah berhasil memberikan pengaruh positif bagi masyarakat. Program ini berpotensi untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas keuangan masyarakat serta memberikan akses yang lebih baik ke sumber daya dan pasar. Selain itu, pemerintah juga turut serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, misalnya melalui pembangunan infrastruktur dan dukungan kebijakan ekonomi. Namun demikian, terdapat pula beberapa kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat, seperti kurangnya koordinasi dan sinergi antar instansi pemerintah terkait serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat agar program-program tersebut dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

**Daftar Pustaka**

- Amin, M. (2018). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas: Sebuah Tinjauan Konseptual. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 1-12.
- Andriani, D. N., Wibawa, R. P., & Pangestu, B. A. (2020). Analisis Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Madiun. *Jupeko (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 5(1), 1-12.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik UMKM Indonesia 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Barron, P. J., Jaffrey, S., & Varshney, A. (2014). *How Large Conflicts Subside: Evidence from Indonesia* (No. 107871, pp. 1-20). The World Bank.
- Darmansyah, D., Badjido, M. Y., & Samad, A. (2014). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kakao di Desa Kayuangan Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1).
- Darwis, R. S., Resnawaty, R., & Hassanah, D. (2019). Peran Pemerintah dalam Kolaborasi Stakeholders pada Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 1-9.
- Fauzi, A. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Model Pengembangan Usaha Berbasis Komunitas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(1), 73-88.
- Hilman, Y. A., & Nimasari, E. P. (2018). Model Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas. *ARISTO*, 6(1), 45-67.
- Jusnaeni, S. (2017). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sektor Pertanian di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. *Universitas Hasanuddin. Skripsi*.
- Kusumawardhani, A. (2018). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Komunitas. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 20(2), 115-122.
- Mardikanto, T., & Setiawan, A. (2020). Peluang dan Tantangan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 21(1), 1-14.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2015). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif dan Kebijakan Publik. *Bandung: PT. Alfabeta*.
- Muliono, M. (2020). Pola Perubahan, Wacana, dan Tren Konflik Sosial di Indonesia. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1(2), 115-132.
- Musa, M. (2017). Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat. *MAWAIZH Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 8(1), 107-125.

- Pongsibanne, H., & Awaru, A. O. T. (2019). Mahasiswa Wirausaha Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 0 (0), 36-40.
- Pratiyudha, P. P., Kafaa, K. A., & Safitri. K. I. (2020). Komunitas Srimpi Urip Solusi Penanganan Rekonsiliasi Konflik Berbasis Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan Ekonomi. *Indonesian Journal of Social Development*. Vol. 1, No. 1 (2020): 1-20; doi.10.14421/ijsd.2020.011.01 <https://jurnal.apsindo.org/index.php/ijsd/index>
- Ramadani, C. (2021). *Efektivitas program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di tinjau Ekonomi Islam (Studi pada Kelompok Wanita Tani Mekar Sari Sejahtera Kelurahan Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar)*. [SKRIPSI]. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rosmiyani, R. (2018). *Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada KUBE Margomulyo Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Sahyana, Y. (2017). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat). *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 157-181.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Suriyani, A., Saleh, S., & Akhmad, A. (2023). Program Inovasi Bina Manusia dalam Pemberdayaan Kelompok Penenun di Sentra Tenun Ikat Jata Kapa Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 288-297.
- Wibawa, R. P., & Andriani, D. N. (2017, November). Implementasi Sistem Ekonomi Berbasis Komunitas sebagai Metode Alternatif Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan pada Masyarakat Madiun. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian LPPM Universitas PGRI Madiun* (pp. 49-55).